Menguatkan pendidikan toleransi dan demokrasi bagi pemilih pemula dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan global untuk menumbuhkan warga negara cerdas

Asep Mahpudz, Roy Kulyawan, Taufiq Eka Riandana

Universitas Tadulako, Palu

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel Diterima: 20/12/2021 Disetujui: 31/12/2021</p> <p>Kata kunci Pendidikan toleransi; Demokrasi; Pemilih pemula; Pendidikan kewarganegaraan global; Warga negara cerdas</p> <p>Keywords <i>Tolerance education; democracy; Novice voter; Global citizenship education; Smart citizen</i></p>	<p>Pemilih pemula merupakan salah satu isu penting yang mendapat perhatian bagi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan tentang langkah transformasi demokrasi dalam masyarakat Indonesia yang memerlukan konsepsi yang benar dan bermakna, dan didukung oleh sarana pendidikan yang tepat sasaran, tepat strategi. Metode kajian yang digunakan dengan pendekatan kepustakaan (<i>library research</i>). Teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen beberapa artikel, manuskrip, buku untuk dianalisis. Proses analisis data menggunakan metode analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa warga negara muda penting diberikan pembekalan agar memiliki literasi politik. Salah satu cara yang efektif melalui sarana pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih sebagai sumber pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan partisipasi politik peserta didik. Partisipasi aktif warga negara dalam aktivitas politik merupakan salah satu ukuran dalam keefektifan proses demokratisasi. Salah satu aspek yang layak ditekankan pada Pendidikan Kewarganegaraan global adalah agar setiap warga negara, terutama warga negara muda mampu berperan sebagai warga negara yang cerdas, demokratis, dan berwatak serta berkeadaban.</p>
	<p>ABSTRACT</p> <p><i>Beginner voters are one of the important issues that get attention for election organizers and election participants. This article aims to describe the steps of democratic transformation in Indonesian society that require a correct and meaningful conception, and are supported by educational facilities that are right on target, with the right strategy. The study method used is a library research approach. Data collection techniques by utilizing several articles, manuscripts, books for analysis. The process of data analysis using content analysis method. The results of the study show that it is important for young citizens to be provided with briefing in order to have political literacy. One effective way is through voter education. Voter education as a learning resource for civic education to increase students' political participation. The active participation of citizens in political activities is one measure of the effectiveness of the democratization process. One aspect that deserves to be emphasized in global citizenship education is that every citizen, especially young citizens, is able to play a role as an intelligent, democratic, and civilized citizen.</i></p>

Pendahuluan

Salah satu aspek penting dalam tatanan demokrasi adalah partisipasi politik. Partisipasi politik sebagai salah satu ciri dari adanya modernisasi politik. Secara konseptual, partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk terlibat secara langsung di dalam proses pemilihan. Proses Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai wujud partisipasi politik. Pemilu merupakan hak warga negara yang mendasar. Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi, maka kedaulatan rakyat menjadi ciri yang ditunjukkan (Yusnedi & Utami, 2019). Pada era reformasi, terjadi perubahan mekanisme pemilihan umum legislatif dan eksekutif. Pemilihan umum eksekutif, telah dilaksanakan secara langsung untuk presiden sejak tahun 2004 dan pemilihan gubernur/bupati/wali kota sejak tahun 2005. Perubahan sistem pemilihan umum secara langsung ini pada hakikatnya bertujuan untuk memilih pemimpin secara demokratis dan representatif sesuai

dengan aspirasi dan keinginan rakyat. Selain itu untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik rakyat (Zuhro, 2018).

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai cerminan dari sistem demokrasi yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sila keempat merupakan ceminan dari asas demokrasi. Ini berarti bahwa pemilihan umum dapat dimaknai secara luas merupakan sarana penting dalam kehidupan negara demokrasi. Ini pula berarti bahwa negara memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya sebagai wakil mereka untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Bagi setiap warga negara, selayaknya dapat berpartisipasi dalam politik, termasuk menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Berkaitan dengan ini, maka warga negara perlu didorong bahkan diberikan pembekalan agar memiliki literasi politik. Salah satu cara yang efektif dapat melalui sarana pendidikan pemilih. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara yang harus digunakan secara cerdas agar menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas dan pemimpin yang tepat.

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, di mana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilu. Terdapat beberapa kajian dan penelitian tentang pemilih pemula dan partisipasi politik (Azirah, 2019; Gumilar, 2019; Irma & Fajriyah, 2021; Lestari & Arumsari, 2018; Ratnamulyani & Maksudi, 2018; Rompas, 2020; Sa'ban & Wijaya, 2018; Saputra, 2017; Wardhani, 2018; Yusnedi & Utami, 2019). Partisipasi aktif warga negara dalam aktivitas politik merupakan salah satu ukuran dalam keefektifan proses demokratisasi. (Hariyanti, 2017). Pendidikan bagi pemilih pemula terutama bagi warga negara muda yaitu siswa dan mahasiswa baru. Para pemilih pemula ini sering kali dideskripsikan sebagai 1) Pemilih yang masih labil dan cenderung apatis; 2) Pemilih yang memiliki pengetahuan politik yang relatif rendah; 3) Pemilih yang cenderung didominasi oleh kelompok (*peer group*); 4) Pemilih yang melakukan pilihan karena aspek popularitas partai politik atau calon yang diusulkan partai politik; 5) Pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya sekedar membatalkan atau menggugurkan haknya.

Jika pemilih pemula seperti peserta didik tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pemilihan umum maka mereka akan menjadi objek yang hanya diinginkan suaranya oleh peserta pemilihan umum. Dengan pemikiran ini, maka pemilih pemula merupakan salah satu isu penting yang mendapat perhatian bagi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang langkah transformasi demokrasi dalam masyarakat Indonesia yang memerlukan konsepsi yang benar dan bermakna, dan didukung oleh sarana pendidikan yang tepat. Dalam pandangan Zuhro (2018) ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi politik Indonesia tahun 2045 seperti menata ulang sistem perwakilan, penataan pemilu dan kepartaian, memperbaiki pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah dan pilkada serentak, dan mengedepankan nilai-nilai budaya Indonesia melalui teladan positif para elit dan aktor.

Metode

Metode kajian yang digunakan dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen beberapa artikel, manuskrip, buku untuk dianalisis. Proses analisis data menggunakan metode analisis isi (Krippendorff, 2004).

Hasil dan Pembahasan

1. Pendidikan toleransi dan demokrasi sebagai penguatan literasi politik generasi muda

Pemilu merupakan salah satu sarana dalam melaksanakan kedaulatan rakyat di Indonesia. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, Pasal 1 Ayat (1) bahwa pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Novianty & Firmansyah,

2020). Pelaksanaan demokrasi atau tidaknya sebuah sistem politik di suatu negara, seringkali dipersepsikan dari pelaksanaan pemilu. Jika pemilu terlaksana dengan demokratis dapat disebut bahwa proses demokratisasi berlangsung dengan baik. Dalam konteks ini, maka partisipasi politik pun menjadi indikator keberhasilannya.

Dalam pandangan Soeprapto et al. (2015), *swing voter* sebagai pemilih pemula memiliki posisi strategis dan signifikan dari pandangan peserta pemilu atau partai politik dan menjadi perhatian penting dari suara yang diharapkan dari pemilih pemula. Seringkali pemilih pemula ini menjadi rebutan untuk suara dari peserta pemilu maupun KPU. Namun, dari beberapa penelitian yang dilakukan, dideskripsikan bahwa pemilih pemula ini cenderung apatis namun rasional. Sikap apatis politik dari pemilih pemula seringkali disebut dengan golongan putih (golput). Jika ini dibiarkan, maka akan dapat mengganggu proses demokratisasi yang sedang dikembangkan Indonesia pasca reformasi. Berkaitan dengan ini, maka partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun program melalui pendidikan bagi pemilih pemula. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi semakin bertambahnya jumlah yang golput. Program-program komunikasi, sosialisasi, serta pendidikan politik dilakukan oleh beberapa partai politik dan KPU di daerah.

Para pemilih pemula seperti peserta didik jenjang SMA dan mahasiswa dilibatkan dalam beragam kegiatan untuk pemahaman hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara muda dalam hak dan kewajiban memilih dan dipilih. Program yang dikembangkan oleh KPU dan partai politik merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara dalam pemilu. Program-program komunikasi dan sosialisasi merupakan bagian penting sebagai pendidikan politik yang lebih menekankan pada aspek kognitif dan perilaku. Dalam konteks ini aspek intensitas komunikasi memiliki peran penting pada setiap program pendidikan politik. Pendidikan politik di zaman sekarang, menjadi penting terlebih bahwa kondisi warga negara muda memiliki wawasan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Kondisi dan keragaman atau kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia penting dilihat sebagai potensi positif dan optimis sebagai realitas yang dimiliki bangsa Indonesia (Masduki, 2016).

Dalam praktek pelaksanaan pemilu, adanya keragaman yang dimiliki akan selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dapat diartikulasikan bahwa keragaman dan pluralistik yang dimiliki akan sangat terkait dengan pilihan untuk saling menghargai dan toleran terhadap pilihan yang berbeda. Toleransi merupakan bentuk dari cara mengakomodasi dalam suatu interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial selayaknya dapat berdialog dan bergaul dengan siapa saja dan tidak hanya dengan kelompok sendiri. Dalam pemahaman ini, maka toleransi dapat dan perlu didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, kebebasan berpikir, mampu berdialog, dan bersikap (Japar et al., 2019). Toleransi bermakna dapat menghargai, membiarkan dan percaya bahwa pendapat dan pandangan yang berbeda dengan dirinya dapat dan perlu dihargai. Oleh karena itu, sikap toleransi dalam konteks ini memerlukan sikap kelapangan dada dan memperhatikan prinsip yang dipegang sendiri.

Sikap toleransi merupakan pendukung budaya demokrasi. Toleransi yang dapat dikembangkan dalam pendidikan bagi pemilih pemula adalah sikap dan tindakan toleran yang menghargai dan menjunjung tinggi hak setiap individu, hak mengemukakan pendapat, hak menjalin hubungan, dan komunikasi sosial. Sikap dan tindakan toleransi pada hakekatnya merupakan satu indikator bangsa yang berhasil mengembangkan demokrasinya. Bagi Indonesia, sikap toleran menjadi bagian penting dalam pendidikan yang dikembangkan di masa depan. Termasuk dalam kaitan ini adalah pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dan pendidikan toleransi menjadi penting untuk dikembangkan di Indonesia kini dan masa depan.

Bagi Indonesia tantangan untuk mewujudkan sebagai Negara demokrasi setidaknya terdapat 3 hal. Pertama, memiliki wakil rakyat yang dapat merepresentasikan keterwakilan secara nyata dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan politik, ekonomi sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kedua, negara dan bangsa senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan tujuan bernegara, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial.

Ketiga, bangsa dan negara memfasilitasi untuk meningkatkan partisipasi rakyat dan menjadikan rakyat sebagai subjek demokrasi. Dalam pandangan Nur & Sudarsono (2018) nilai-nilai demokrasi antara lain sebagai berikut: 1) Kebebasan berpendapat; 2) Kebebasan berkelompok; 3) Kebebasan berpartisipasi; 4) Kerjasama; 5) Kesetaraan antar warga; 6) Kedaulatan rakyat; 7) Rasa percaya (*trust*); dan 8) Kesetaraan gender.

Dari perspektif kepentingan nasional, pendidikan politik menjadi hal yang penting bagi suatu negara demokrasi seperti Indonesia. Oleh karena itu, warga negara muda, sebagai pemilih pemula perlu mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang jelas bahkan pencerahan seputar persoalan politik yang terjadi di negara. Pengetahuan, wawasan dan pemahaman politik yang jelas setidaknya pada gilirannya dapat menumbuhkan kesadaran politik warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu bersikap dan menanggapi persoalan politik di sekitar lingkungan kehidupannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Rosyad & Maarif (2020) bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi telah diterima oleh hampir di seluruh negara di dunia, memiliki tiga unsur utama, yaitu: 1) adanya kemauan politik sebuah negara (*state*); 2) adanya kemauan yang kuat dari politik masyarakat (*political society*); dan 3) adanya *civil society* yang kuat dan mandiri.

Urgensi pendidikan demokrasi dan toleransi di Indonesia pasca reformasi bertujuan untuk menyiapkan warga negara muda untuk mampu berfikir kritis, bertindak demokratis dengan kesadaran tinggi untuk menjamin keberlangsungan kehidupan di masyarakat secara harmonis, dan menjadi hak-hak yang dimiliki. Dalam pengembangan pendidikan demokrasi, setidaknya ada dua yang penting ditekankan, yaitu: 1) Demokrasi sebagai konsep, bermakna arti dari sikap perilaku yang dapat termasuk demokratis; dan 2) demokrasi sebagai praksis, artinya demokrasi sudah menjadi sistem yang dapat dilaksanakan (Budiwan & Fadrusiana, 2019).

Langkah mewujudkan pendidikan demokrasi dan toleransi di Indonesia dapat dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan selama ini telah berperan dalam mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang dapat mengetahui hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sati & Dewi, 2021). Semakin penting menekankan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu cara agar seluruh bangsa Indonesia menjadi warga negara yang memiliki sikap berbangsa dan bernegara (Rafifah & Dewi, 2021). Penting menempatkan pendidikan Kewarganegaraan pasca reformasi untuk memposisikan warga negara demokratis sebagai bagian utama dalam mendukung identitas dan jati diri keindonesiaan terutama dalam rangka mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional Indonesia sebagaimana tertuang di dalam konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 (Muhtaj et al., 2020).

2. Demokratisasi berbangsa dan bernegara dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan global

Pemilu merupakan proses pelibatan warga negara kedalam proses pemilihan dan pelibatan dalam pemerintahan. Warga negara dilibatkan untuk dengan aktif memilih dan menentukan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan di eksekutif dan legislatif pada periode tertentu. Proses pemilu ini merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk memilih dan dipilih, menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan, dan mengatur kehidupan warga negara (Pahlevi & Amrurrobi, 2020). Sejak tahun 2004 Indonesia telah melaksanakan pemilu secara langsung dan telah berjalan dengan baik. Kemajemukan warga masyarakat dan warga negara telah mampu melahirkan harmoni dan keserasian serta keterpaduan yang sangat baik karena disikapi dan dikelola dengan penuh kearifan (Rosyad & Maarif, 2020). Dalam pemikiran ini, maka menjadi penting untuk terus mengembangkan dan membina kehidupan demokrasi Indonesia yang dilandasi nilai dasar Pancasila, dikawal oleh UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI dengan dukungan nilai-nilai budaya politik dan demokrasi (Zuhro, 2018).

Dalam pandangan (Zuhro, 2018) langkah-langkah strategis pengelolaan politik Indonesia di masa depan. Pertama, menata ulang sistem pemilu dan pilkada. Kedua, menata ulang sistem perwakilan. Ketiga, membenahi praktik desentralisasi dan otonomi daerah. Keempat, reformasi partai politik. Kelima, memperbanyak teladan positif, baik melalui elit politik maupun birokrasi dan aktor/tokoh. Dengan demikian, transformasi demokrasi dalam masyarakat Indonesia setidaknya memerlukan konsepsi yang dapat diyakini benar dan bermakna serta didukung oleh sarana pendidikan yang tepat sasaran, dan tepat strategi. Hal ini agar setiap individu sebagai warga negara mampu memerankan dirinya sebagai warga negara yang cerdas, demokratis, dan berwatak serta berkeadaban (Budiwan & Fadrusiana, 2019). Dalam konteks pentingnya demokratisasi berbangsa dan bernegara, maka penting diperhatikan partisipasi dan kesadaran politik bagi warga negara muda.

Warga negara mudapada umumnya sebagai pemilih pemula di pemilu. Terdapat keunggulan komparatif pada kelompok pemilih muda. Mereka adalah pemilih yang secara psikologis memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok pemilih lainnya yang dewasa. Misalnya mereka mandiri, kritis, anti *status quo* dan menginginkan perubahan. Ciri-ciri ini cocok dengan karakteristik pemilih cerdas, yakni kelompok pemilih yang punya pertimbangan rasional dan kritis dalam menentukan pilihannya. Pemilih jenis ini akan berhitung tentang siapa kandidat, bagaimana *track-record*-nya, dan apa program kerja yang ditawarkan. Oleh karena itu, pemilih pemula lebih mudah untuk diajak serta punya sikap anti politik uang dan anti berita bohong (*hoaks*). Namun pada sisi lain, kelompok ini juga berpotensi golput, mereka cenderung cuek melihat pemilu. Sikap cuek ini terutama mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang kandidat atau partai politik peserta pemilu (Fitriyah et al., 2021).

Dalam pandangan ini, menjadi penting pengembangan peran media sosial untuk membangun peningkatan partisipasi dan kesadaran politik warga negara muda sebagai pemilih pemula. Peran media sosial sebagai sarana informasi bagi pemilih muda penting. Hasil penelitian dari Rozuli & Haboddin, (2018) bahwa sebanyak 64% responden yang diteliti menyebut akan mengikuti diskusi soal pemilu dari media sosial. Meskipun menurut responden ini posisi media sosial ini sebagai sumber informasi belum menggantikan ataupun menggeser peran media massa cetak dan elektronik. Sebanyak 95% responden mengaku akan menggunakan media massa ini untuk mengikuti diskusi soal pemilu.

Hasil kajian dari Rahman, (2018) mengkategorikan pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia serta untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan didukung oleh tingkat partisipasi politik yang baik dan berkualitas maka akan diperlukan pengkondisian yang baik dan kondusif. Salah satu yang penting ditekankan adalah warga negara sebagai pemilih yang cerdas, berliterasi politik baik, cerdas, kritis, dan rasional. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa sebagai warga negara yang cerdas secara politik, tidak hanya paham dan tahu tentang tatacara pemilu, tetapi juga disertai pemahaman yang baik dalam kebebasan memilih dan tidak terintimidasi politik untuk melihat yang ditentukan oleh pilihan orang lain. Mereka paham dan menyadari dengan baik makna suara yang diberikan serta konsekuensi politik dari pilihan yang ditetapkan (Sutisna, 2017). Sebagai warga negara muda, pemahaman, kepedulian, dan partisipasi pemilih pemula dalam membangun dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sangat menentukan masa depan demokrasi di Indonesia (Iskandar & Marlina, 2019; Kurniawansyah & Alqadri, 2021; Muhtaj et al., 2020).

Pendidikan Kewarganegaraan dalam kaitan dengan penguatan pendidikan politik bagi pemilih pemula diharapkan dapat membentuk kepribadian warga negara muda yang cerdas dan baik. Langkah yang penting dikembangkan dalam rangka ini, antara lain dengan membentuk warga negara global yang cerdas, baik yang memiliki sikap peduli terhadap kondisi masyarakat dan sikap untuk mau dan mampu melakukan perubahan yang lebih baik. Sikap peduli bermakna bahwa warga negara muda ini mampu mengembangkan dan berkemampuan serta peduli pada kondisi lingkungan terdekat dan lingkungan masyarakat global (Sutrisno, 2018). Sebagai bagian dari warga global, warga negara muda dibina dan dikembangkan persepsi terhadap hak, kewajiban, dan tanggungjawab sebagai warga global dengan baik dan cerdas tanpa membedakan keberagaman yang dimiliki. Pengembangan proses demokratisasi perlu lebih ditingkatkan terlebih di era globalisasi. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Terutama dalam upaya pembinaan demokrasi dan toleransi (Ulfah et al., 2021). Proses demokratisasi ini menyangkut aspek partisipasi warga negara dalam proses politik, maka penyiapan warga negara agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab juga merupakan isu penting dalam proses demokratisasi saat ini.

Dalam kaitan ini, maka Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting untuk mempengaruhi dan memberikan pemahaman dan partisipasi politik warga negara dengan memfasilitasi melalui sarana pendidikan bagi pemilih pemula (Rahman, 2018). Sebagai langkah untuk menciptakan masyarakat yang berliterasi politik maka diperlukan pendidikan politik. Pendidikan politik dalam kaitan ini adalah memberikan pengetahuan tentang mekanisme pemilu maka akan menjadi upaya peningkatan pemahaman bagi pemilih pemula dalam mencerna sebuah informasi tentang politik (Harnom et al., 2019). Pada hakekatnya dalam konteks ini tujuan pendidikan politik ialah adalah untuk menjadikan masyarakat berdaya dan berkemampuan tidak hanya sekedar memahami, namun juga mengaplikasikan perilaku politik dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Hasil kajian menunjukkan bahwa warga negara muda penting diberikan pembekalan agar memiliki literasi politik. Salah satu cara yang efektif melalui sarana pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih sebagai sumber pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan partisipasi politik peserta didik sebagai warga negara muda. Partisipasi aktif warga negara dalam aktivitas politik merupakan salah satu ukuran dalam keefektifan proses demokratisasi. Salah satu aspek yang layak ditekankan pada Pendidikan Kewarganegaraan global adalah agar setiap warga negara, terutama warga negara muda mampu berperan sebagai warga negara yang cerdas, demokratis, dan berwatak serta berkeadaban. Siswa dan mahasiswa sebagai pemilih pemula dituntut untuk melek terhadap politik, agar dapat berperan sebagai pengontrol terhadap jalannya pemerintahan yang berkuasa.

Daftar Pustaka

- Aeni, E. T. (2021). Pembentukan Sikap Toleransi dan Bersahabat dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD/MI. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/auladuna.v8i1a4.2021>
- Azirah. (2019). Partisipasi Politik Pemilih pemula dalam Pesta Demokrasi. *Politica*, 6(2), 86–100.
- Budiwan, J., & Fadrusiana, E. G. (2019). Pembelajaran PPKn di Perguruan Tinggi Sebagai Alternatif Pendidikan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Upaya Membangun Masyarakat Madani. *Qalamuna*, 11(2), 73–88.
- Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.1-10>
- Gumilar, Y. (2019). Model Partisipasi Politik pemilih Pemula (studi tentang pemilihan kepala daerah Kota Bandung). *SOSPOL: Jurnal Sosial dan Politik*, XXIV(1), 60–74.

- Hariyanti. (2017). *Pendidikan Pemilih Sebagai Sumber Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Peserta Didik*.
- Harnom, F., Syahrizal, S., & Valentina, T. R. (2019). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Milenial Dalam Memahami Bahaya Vote Broker Oleh KPU. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i1.2019.1-10>
- Irma, & Fajriyah, N. (2021). Rendahnya Partisipasi Politik Pemula pada Pemilihan Umum. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(1), 110–114.
- Iskandar, D., & Marlina, N. (2019). Pendidikan Pemilih Muda Cerdas Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 01(01), 12–18. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/4713>
- Japar, M., Irawaty, I., & Fadhillah, D. N. (2019). Peran Pelatihan Penguatan Toleransi Sosial Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(2), 94–104. <https://doi.org/10.23917/jpis.v29i2.8204>
- Krippendorff, K. (2004). Content Analysis an Introduction to its Methodology. In *Physical Review B* (Vol. 31, Issue 6). Sage Publications, Inc California. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.31.3460>
- Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2), 286–292.
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan walikota Semarang di Kota Semarang. *Integralistik*, 1, 63–72.
- Masduki, H. (2016). Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama. *Dimensi*, 9(1), 15–23.
- Muhtaj, M. El, Siregar, M. F., PA, R. B. B., & Rachman, F. (2020). Literasi Hak Asasi manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal HAM*, 11(3), 369–386. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11>
- Novianty, F., & Firmansyah, S. (2020). Peran Dosen Program Studi Ppkn Dalam Mengembangkan Budaya Demokrasi Pancasila Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 70. <https://doi.org/10.31571/pkn.v4i1.1793>
- Nur, S., & Sudarsono. (2018). Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS : Studi Kasus SMA Negeri 6 Takalar. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, VI(1), 95–103. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v6i2.2585>
- Pahlevi, M. E. T. P., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152.
- Rafifah, T., & Dewi, D. A. (2021). Mengenal Lebih Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Hingga Jenjang Perguruan Tinggi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 264–271. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.637>
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44. <https://doi.org/10.24114/jupii.v10i1.8385>
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2), 154–161. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.13965>
- Rompas, I. R. (2020). Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Desa

- Bongkudai Selatan Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongodow Timur. *Jurnal Politico*, 9(1), 1–22.
- Rosyad, A. M., & Maarif, M. A. (2020). Paradigma Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 75–99. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491>
- Rozuli, A. I., & Haboddin, M. (2018). Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(2), 129–148. <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea>
- Sa'ban, L. M. A., & Wijaya, A. A. M. (2018). Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi. *MEDIALOG: Jurnal Kajian Komunikasi*, I(II), 35–43. <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Medialog/article/view/275>
- Saputra, R. (2017). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tahun 2014. *JOM FISIP*, 4(1), 1–12.
- Sati, L., & Dewi, D. A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 904–909. <http://ppkn.org/wp-content/uploads/2018/01/PROSIDING-FULL-RUANG-baruI.pdf#page=126>
- Soeprapto, A., DN, S., & Suparno, B. A. (2015). Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014 di DIY. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 39–54.
- Sutisna, A. (2017). Strategi peningkatan literasi politik pemilih pemula melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. *Journal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 135–146.
- Sutrisno. (2018). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Warga Negara Global. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1 April), 41–51. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship>
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329–346. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1576>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>
- Yusnedi, & Utami, S. (2019). Korelasi Tingkat Pendidikan dengan Partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Nasional serentak 2019 di kabupaten Indragiri huku. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(2 Desember), 312–320. <https://doi.org/https://doi.org/10.34006/jmbi.v8i2.113>
- Zuhro, S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan Indonesia. *Interaktif Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 1–28. <http://jurnal.umpalembang.ac.id/variahukum/article/view/942/839>